

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara Dinas Sosial

No.	Indikator	Pertanyaan wawancara
1.	Starting Condition (Kondisi Awal)	1. Mengapa Dinas Sosial tertarik untuk meluncurkan program kampung madani dengan menggandeng pihak swasta? 2. Bagaimana aktor-aktor menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan atau pencapaian tujuan bersama 3. Bagaimana hubungan asimetris dengan stakeholder?
2.	Kepemimpinan	1. Bagaimana proses perencanaan Dinas Sosial tentang program kampung madani terlaksana dalam kolaborasi ? 2. Bagaimana Dinas Sosial membangun kepercayaan dengan pihak swasta dan masyarakat ? 3. Upaya apa yang dilakukan Dinas Sosial untuk menghasilkan Keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi Masyarakat, pihak swasta ? 4. apakah anda melihat tantangan utama dalam menerapkan program kampung madani? 5. Apa strategi Dinas Sosial dalam mengukur keberlanjutan dari program kampung madani? 6. Bagaimana Dinas Sosial mengevaluasi efektivitas dari strategi kampung madani yang Anda terapkan?
3.	Desain intitusional	1. Apakah Dinas Sosial membuat aturan yang jelas dalam pelaksanaan kolaborasi program kampung madani? 2. Apakah terdapat trasnparansi dalam proses kolaborasi pada setiap

		pemangku kepentingan?
4.	Proses kolaborasi	1. Apakah komunikasi (rasa saling percaya, komitmen, pemahaman) terjalan dengan baik antara Dinas Sosial, masyarakat dan pihak swasta? 2. Apakah terdapat target keberhasilan yang dicapai dalam proses kolaborasi kampung madani? 3. Bagaimana peran Dinas Sosial, pihak swasta, masyarakat dalam mendukung kolaborasi ? 4. Bagaimana cara Dinas Sosial membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta atau organisasi non-pemerintah untuk mendukung program kampung madani? 5. Bagaimana Dinas Sosial mengevaluasi efektivitas hasil sementara yang telah dicapai ?

2. Pedoman wawancara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Indikator	Pertanyaan wawancara
2.	Starting Condition (Kondisi Awal)	1. Mengapa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tertarik untuk meluncurkan program kampung madani dengan menggandeng pihak swasta ? 2. Bagaimana aktor-aktor menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan atau pencapaian tujuan bersama 3. Bagaimana hubungan asimetris dengan stakeholder?
5.	Kepemimpinan	1. Bagaimana proses perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

		dan Perdagangan Kota Surabaya tentang program kampung madani terlaksana dalam kolaborasi ? 2. Bagaimana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya membangun kepercayaan dengan pihak swasta dan masyarakat ? 3. Upaya apa yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk menghasilkan Keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi Masyarakat, pihak swasta ? 4. apakah anda melihat tantangan utama dalam menerapkan program kampung madani? 5. Apa strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam mengukur keberlanjutan dari program kampung madani? 6. Bagaimana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya mengevaluasi efektivitas dari strategi kampung madani yang Anda terapkan?
6.	Desain intitusional	1. Apakah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya membuat aturan yang jelas dalam pelaksanaan kolaborasi program kampung madani? 2. Apakah terdapat trasnparansi dalam proses kolaborasi pada setiap pemangku kepentingan?
7.	Proses kolaborasi	1. Apakah komunikasi (rasa saling percaya, komitmen, pemahaman) terjalan dengan baik antara Dinas Sosial, mayarakat dan pihak swasta? 2. Apakah terdapat target keberhasilan yang dicapai dalam proses kolaborasi

		kampung madani? 3. Bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, pihak swasta, masyarakat dalam mendukung kolaborasi ? 4. Bagaimana cara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta atau organisasi non-pemerintah untuk mendukung program kampung madani? 5. Bagaimana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya mengevaluasi efektivitas hasil sementara yang telah dicapai ?
--	--	--

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara Dinas Sosial, Ibu Anisya S.H informan sebagai tim koordinasi Perlindungan Sisial, Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Mei 2024 bertempat di Dinas Sosial Kota Surabaya.

1. Mengapa Dinas Sosial tertarik untuk meluncurkan program kampung madani dengan menggandeng pihak swasta?
Dinsos sebagai pelaksana yang menyediakan data keluarga miskin di wilayah opd, yang diminta bapak untuk peduli teman teman kelurahan mendekati warganya masuk kategori miskin contoh ada asn nah asn ini memberikan contoh untuk memberikan iuran kepada gakin tersebut sampai berusaha. Mmemberikan bantuan sodqah berkordinasi dengan lurah mencari donasi dari keluarga yang mampu untuk diberikan kepada gakin nya.dinas dosial
2. Bagaimana aktor-aktor menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan atau pencapaian tujuan Bersama?
Para opd berkerja sama seperti intruksi bapak walikota untuk mengentaskan kemiskinan di surabaya melalui program kampung madani, setiap opd

memiliki perannya masing masing kalau dinsos sebagai penyedia data keluarga miskin

Para stakeholder menjalankan kekuasaannya sesuai tupoksi yang dimiliki setiap opd

3. Bagaimana hubungan asimetris dengan stakeholder?

kalau dinsos masing masing rw bekerjasama dengan lurahnya sampai gakin itu selesai sekaligus mengedukasi, kalau misalkan terdapat lansia tinggal sebatang kara dari kelurahan berkordinasi dengan rt rw itu dengan persetujuan keluarga atau keluarga jauh menyetujui untuk bisa ditempatkan di panti wada, karena dinsos punya panti warda sehingga lansia tersebut terawasi dari keseharainnya bisa terawa, mandi pagi sore terdapat perawat, makan, pengobatan terkontrol setiap harinya terbutuhi kebituhan dasarnya, tapi kalau usia produktif misalkan sepasang suami istri masuk kategori gakin untuk kebutuhan sehari hari susah, diupayakan untuk mereka yang bekerja untuk ikutkan yang Namanya padat karya. Program dari pemerintah dalam satu rumah terdapat ayah nanti diarahkan untuk bisa bergabung pada program peemrintah kota, missal ada pembuatan oaving kalau di amau bersedia ya dijalankan Bersama kelompok.nanti paving tersebut akan dibeli pemerintah kota surabaya hasil dari penjualan tersebut akan diberikan gaji kepada mereka.

4. Bagaimana proses perencanaan Dinas Sosial tentang program kampung madani terlaksana dalam kolaborasi ?

Bantuan yang diberikan 6 bulan sekali tidak secara terus menerus itu pun berkordinasi dengan diverivikasi rt rw lurah camat kebudian di survey dengan dinsos apabila tidak disetujui rt rw berarti gagal masuk kategori nan gakin

5. Bagaimana Dinas Sosial membangun kepercayaan dengan pihak swasta dan masyarakat ?

dinsos membantu untuk pendataan keluarga miskin berkordinasi dengan rt rw lurah setempat untuk menyamakan data di lapangan dan di aolikasi

6. Upaya apa yang dilakukan Dinas Sosial untuk menghasilkan Keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi Masyarakat, pihak swasta ?

Survey yang dilakuakn langsung oleh dinsos untuk melihat langsung kondisi di lapangan setelah Masyarakat miskin tersebut diverifikasi oleh kelurahan

7. apakah anda melihat tantangan utama dalam menerapkan program kampung madani?

Terkadang terdapat Masyarakat miskin yang masih belum bisa berkembang secara mental dan pikiran. Program km ini untuk memberdayakan msayarakat miskin tetapi msayarakat ada yang tidak mau untuk ikut program tersebut karena takut dicoret dari daftar gakin dan itu harapannya

mahasiswa untuk bisa mengubah mindset warga untuk bisa berkembang lebih baik lagi.

8. Apa strategi Dinas Sosial dalam mengukur keberlanjutan dari program kampung madani?
 Kami diusing Bersama setiap dua minggu atau sebulan itu pasti ada evaluasi yang dipimpin oleh sekda dengan mengundang seluruh kecamatan seperti kemarin ada undangan mengevaluasi intervensi kampung madani itu pak sekda yang memimpin dinsos hanya opd pendukung. Ini adalah program pemerintah kota
9. Bagaimana Dinas Sosial mengevaluasi efektivitas dari strategi kampung madani yang Anda terapkan?
 Mengevaluasi bukan hanya dengan dinsos saja karena setiap bulan ada yang namanya musyawarah kelurahan disitu kel bisa mengupdate data warga yang masuk kategori gakin mengtidaklayakkan atau naik Tingkat dari gakin menjadi peramis atau ditidaklayakkan karena sudah mampu. Melalui muskel setiap bulan yang dibuka melalui aplikasi si gakin.
10. Apakah Dinas Sosial membuat aturan yang jelas dalam pelaksanaan kolaborasi program kampung madani?
 Kalau untuk peraturan gakin ada di perwali kalau untuk kampung madani secara lisan kepada opd lurah camat, ini ada kebijakan untuk memberdayakan masyarakat miskin di kota surabaya ini himbuan saja. Bantuan usaha terdapat Ketika th 2022 dinsos kedatangan sebagai opd pengampu kegiatan dalam pemberdayaan bantuan perhutuk cukai rokok, cukai rokok diberikan blt dan bantuan modal usaha dari situ dinsos sudah mulai jalan bantuan usaha kita bersurat lurah camat apakah ada warga yang mau berjualan kemudian kita menyesuaikan, yang diberikan dinsos itu alat nya. Dasarnya dulu itu kebijakan pak wali kepada opd dan lurah camat jadi sama sama peduli menegtaskan kemiskinan
11. Apakah terdapat transparansi dalam proses kolaborasi pada setiap pemangku kepentingan?
 Pertemuan yang dilakukan sebulan sekali untuk membahas perkembangan kampung madani itu merupakan transparansi guna koordinasi lebih baik lagi pada setiap pemangku kepentingan.
12. Apakah komunikasi (rasa saling percaya, komitmen, pemahaman) terjalin dengan baik antara Dinas Sosial, masyarakat dan pihak swasta?
 Komunikasi sementara ini rapat, kemudian evaluasi dengan sekda kalau dengan warga pada saat survey lapangan. Terdapat aplikasi yang dibuat berkejasama dengan diskominfo, yang wajib mengisi nanti kelurahan dan opd pengampu masing masing opd diminta menjadi pengampu dan mensupport kecamatan yang sudah ditunjuk

13. Apakah terdapat target keberhasilan yang dicapai dalam proses kolaborasi kampung madani?
Menjadikana Masyarakat yang berdaya
14. Bagaimana peran Dinas Sosial, pihak swasta, masyarakat dalam mendukung kolaborasi ?
Peran dinsos sebagai pelaksana menyediakan data keluarga miskin di kota surabaya berkordinasi denga lurah camat setempat
15. Bagaimana cara Dinas Sosial membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta atau organisasi non-pemerintah untuk mendukung program kampung madani?
Csr bisa jadi melalui warga warga yang mampu atau warga yang memiliki Perusahaan yang mensodaqahkan ke kampung tersebut tapi tidak semua kelruhaan. Kalau di dinsos ada hotel vasa dia meberikan kursi roda fasilitas untuk disabilitas.
16. Bagaimana Dinas Sosial mengevaluasi efektivitas hasil sementara yang telah dicapai?
Kalau dari evaluasi kemarin memang ada ayang sudah berhasil itu yang nantinya bisa menjadi pemicu kepasda mereka yang ingin berdaya ada beberapa ayng sudah jakan yang sudah berjakan menjadi contoh dengan dibantu pemerintah sudah yang tadinya omsetnya 0 sekarang perbulan sudah menghasilkan. Dan di aplikasi ada bisa diperjualbelikan secara online

Transkrip wawancara BAZNAS, Imam Syafi'I S.T informan sebagai kepala pelaksana IT dan umum. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di kantor BAZNAS Surabaya.

1. Mengapa BAZNAS tertarik untuk meluncurkan program kampung madani dengan menggandeng pihak swasta ?
Yang menginisiasi kampung madani bukan basnas awalnya dari BWI surabaya ada gagasan salah satu programnya pembentukan kampung madani di setiap kampung kota surabaya dulu targetnya bukan kampung tapi kelurahan jadi ada target, karena disitu pak wali mengetahui akhirnya pak wali diadopsi menjadi program walikota mempercepat, karena ide kampung madani adalah bagaimana kita memperdayakan masyatakat sekitar untuk melakukan pengumpulan, baznas ada pengumpulan infak sodakoh yang nantinya dana itu digunakan untuk memperdayakan masyarkat sekitar, yang intinya mengurangi masayrakat miskin salah satu upayanya memperdayakan masyarakat miskin tiidak memiliki pekerjaan pelatihan UMKM terus kita beri support missal rombongan atau modal usaha sampai ub atau kkelompk usaha Bersama yang digagas oleh kampus kemarin juga memeprlibatkan

dinas dinkop. Hari ini sudah berjalan ada beberapa titik project kampung madani sekitar 17

4. Bagaimana aktor-aktor menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan atau pencapaian tujuan bersama

Setiap opd dan baznas memiliki peran masing masing guna mensukseskan program kampung madani baznas sendiri berperan sebagai badan pendamping untuk upz masjid

5. Bagaimana hubungan asimetris dengan stakeholder?

Untuk hubungan program yang awalnya kan dari bwi, hubungan memang langsung dari dari walikota ada salah satu orang yang diamanahi untuk menjadi nahkoda terjadinya kampung madani ini, hubungannya langsung oemkot, kecamatan berhubungan atau turun basnas lewat ups kecamatan, kemudian turun ke sub upz tiap rw. Yang hubungan lainnya lebih ke misalkan kampung madani perlu pengambilan data ke dispenduk perlu tidak diambilkan ke zis lewat ke disor hubungannya dari pemerintah langsung ke bawah.

6. Bagaimana proses perencanaan BAZNAS tentang program kampung madani terlaksana dalam kolaborasi?

Kemarin juga salah satu cara mengumpulkan zakat sedekah yang pasti dari wilayah yang dikumpulkan harus didahulukan kota surabaya di wilayah tersebut dalam hal ini menggandeng laz atau baznas. Menggait yang setara legal bias mengumpulkan dana, itu salah satu bagian dari kampung madani

7. Bagaimana BAZNAS membangun kepercayaan dengan pihak swasta dan masyarakat?

Kalua masalah ketidakpercayaan tergantung dari pelaksana di bawah kemrin ada rencana dalam melakukan pengumpulan menggandeng tokoh masyarakat seperti kyai ustad tokoh masyarakat pengumpulan zis yang terpetakan artinya pengurus sudah memetakan warga yang muzaki yang prioritas yang bisa mengeluarkan hartanya untuk kampung madani. 2. Bisa menggunakan kreatifitas bisanya klaporan dan program misal jumat berkah atau makan gratis itu kreatifitas pengurus kampung madani untuk meningkatkan pengumpulan

8. Upaya apa yang dilakukan BAZNAS untuk menghasilkan Keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi Masyarakat, pihak swasta?

Upaya kita menyumbang untuk menyumbang kampung madani sosialisasi upz dan sub upz rw, kita mengedukasi bahwa unit pengumpulan zakat itu pengumpulannya gimana penyaluran gimana wiranti itu gimana kita lebih suprotnya ke situ lebih ke ranahnya baznas misal ub atau keomok usaha

itu nanti dinsos kita lebih ke lembaga upz atau sub upz yang menjadi penumpukan atau pendistribusian zakat

9. apakah anda melihat tantangan utama dalam menerapkan program kampung madani?

Tantangan nya secara umum programnya secepatnya terbentuk di 31 kec atau 153 kel ada semuanya secara otomatis kita membentuk upz kec sub upz itu tantangannya sebanyak itu melakukan edukasi memang tidak gampang juga sebagai Lembaga pengumpul zakat. Memang kita sudah jalan di kec banyak yang kurang oagan memang harus di pantau terus

10. Apa strategi BAZNAS dalam mengukur keberlanjutan dari program kampung madani?

Strategi kemarin kita mengadakan sosialisasi terkait upz dan sub didalam nya adal pelaporan eu teknik pengumpulan pendistribusian secara syai belum mendetail kearah samna masi sosialisasi sap aitu sub dan upz, kedepannya lebih mengutkan mendalam organisasi sub upz atau missal rkat segarsnya melakukan itu dan itu harus ada sosialisasi dan ditemani tidak mungkin satu kali paham harus ditemani. Sementara perbantuan kenga tim baznas, rencananya buldep melakukan edukasi, sudah berjalan tetapi tida semuanya, kita pernah melkukn ed uke kec artinya dikumpulkan sekda di walikota sana ap aitu sub dan upz tapi blom pahan akhirnya mengundang di wilayahnya tetapi uty kan banyak jadi belum semua

11. Bagaimana BAZNAS mengevaluasi efektivitas dari strategi kampung madani yang Anda terapkan?

Evaluasi terkait rencana berikutnya itu dari hasil teman teman melakukanoendampngan atau sosialisasi itu nanti problem di lapangan di evaluasi ya lebih teknis langsung sehabisa daa sosialisasi, kemrin lemb pengum zakan kadang bergesekan dengan laz yang belum tau bahwa salah satu fungsi sub mebantu upz ngga harus mengumpulakn tapi biasa koordinasi mereka salah tingkat itu salah satu evaluasi dari kita

12. Apakah BAZNAS membuat aturan yang jelas dalam pelaksanaan kolaborasi program kampung madani?

Sop kampung madani mengacu pada pusat yang nantinya akan diterapkan diberlakukan beberapa yang bisa di terapkan transparansi hanya sub upz dan upz aturan karena basnas nonstructural langsung yang menahkodai dari baznas pusat, peraturan ambil dari sana uu tenang pengelolaan zakat pp no 14 tahun 2014 terkait ppenerapan uu ada turunannya lagi peraturan perbasnas dibuat untuk baznaz tersebut, terperinci samapi organisasi baznas ituapa terkait pengelolaan keuangan oendistribusian samaai terbaru ada baznas kota, perbasnas 2016 terkait unit pengumpulan zakat itu sudah mendetail dari sub upz dan upz

13. Apakah terdapat transparansi dalam proses kolaborasi pada setiap pemangku kepentingan?

Dalam kampung madani terdapat website untuk semua opd bisa melihat seberapa banyak santunan yang diberikan, kampung mana saja yang terdapat masjid sebagai pengelola zis, aplikasi tersebut dibuat oleh diskominfo.

14. Apakah komunikasi (rasa saling percaya, komitmen, pemahaman) terjalin dengan baik antara BAZNAS, masyarakat dan pihak swasta?

Komunikasi, masi ada miskom kalau belum paham banyak kita melakukan sosialisasi, yg paham dengan sosialisasi sekitar 60 persen Kerjasama baik, untuk baznas sub upz upn

Komunikasi ada system informasi yang menyambungkan antara baznas kel upz laz

15. Apakah terdapat target keberhasilan yang dicapai dalam proses kolaborasi kampung madani?

Target keberhasilan karena memang tugas kita mengurus upz, untuk endirian upz maupun sub upz sudah diterapkan target berikutnya akan berjalan nah itu target berjalan

16. Bagaimana peran BAZNAS, pihak swasta, masyarakat dalam mendukung kolaborasi ?

Peran baznas untuk memperkuat sub upz dan upz kita sudah membentuk kelembagaan tsb sesuai jalannya mendirikan harus kuat

17. Bagaimana cara BAZNAS membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta atau organisasi non-pemerintah untuk mendukung program kampung madani?

Membangun kepercayaan sementara di dalam rkap yang dilakuakn upz dan sub upz mendata warga miskin atau laporan ke dinas dinas dispenduk ini warga yang kurang mamou kalau memang butuh bekerja nanti akan dicarikan kerja, nanti mereka juga akan membuat rencana muzaki.

18. Bagaimana BAZNAS mengevaluasi efektivitas hasil sementara yang telah dicapai ?

Apakah evaluasi nya kalau efektif mungkin perlu waktu, berrati saya bisa bilang ngga efektif kalau by terbentjuk sudah ada 2/3 masjid yg efektif kalau yang lainnya se kota surabaya belum efektif.

Transkrip wawancara kelurahan Pradah Kalikendal, Shanti Hartanto, S.Sosio informan sebagai Kepala Sie Kesejahteraan Masyarakat. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 April 2024 bertempat di Kelurahan Pradah Kalikendal.

1. Bagaimana pandangan pegawai kelurahan program kampung madani dengan dan pihak swasta ?
kampung madani merupakan kampung yang didalamnya mewujudkan mekanisme gotong royong, dengan cara mengajak warganya untuk saling peduli kepada sesama (manusia sebagai makhluk sosial), sehingga penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dimulai dari sini, selanjutnya keswadayaan dan kemandirian warga sedikit demi sedikit dapat berjalan. Saat ini konsep kampung madani di kel.pradah kalikendal sedikit demi sedikit mulai diterapkan di beberapa program dan kegiatan
2. Bagaimana jika terdapat ketidak seimbangan antara sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan yang berbeda?
jika ada ketidakseimbangan biasanya langsung melakukan koordinasi dengan stakeholdernya
3. Bagaimana kemampuan kolaboarsi pegawai kelurahan dalam pengelolaan tanggung jawab pada program kampung madani
alam hal ini, kelurahan sebagai pelaksana di lapangan bersama-sama dg warga setempat, selain melakukan sosialisasi kepada warga, kelurahan juga melakukan pendataan, monitoring, dan juga penilaian kampung madani terkait kemandirian ekonomi melalui zakat, infaq, dan sedekah yang juga berkolaborasi dengan Bagian administrasi pemerintah dan otonomi daerah dan juga perangkat masjid setempat
4. Apakah kolaborasi tersebut menghasilkan Keputusan yang sama antar pegawai kelurahan dengan masyarakat dan pihak swasta?
tentunya, karena tujuan dari kampung madani sendiri untuk kebaikan bersama, dimana warga untuk saling peduli kepada sesama.
5. Bagaimana peran kepemimpinan dalam memfasilitasi kolaborasi dan memimpin berbagai pihak menuju pencapaian tujuan bersama?
sesuai dengan tugas pokok masing-masing yg telah disepakati bersama pada tahap perencanaan. setiap stakeholder memiliki peran masing-masing. di pemerintahan program kampung madani meliputi :
 - aspek fisik (program fisik) : bedh rumah, penerangan jalan umum, saluran
 - aspek sosial/kemasyarakatan/keluarga (program sosial) : kawasan tanpa rokok, kawasan anti narkoba
 - aspek ekonomi ekonomi/usaha (program ekonomi) : padat karya

- aspek sosial pendidikan/ kesehatan : pencegahan stunting
 - aspek spiritual dan akhla (prog religi) sinau dan ngaji bareng
 semua ini ditunjang dg adanya program kampung madani guna melengkapi dan memperkuat aspek spiritual dan material

6. Apakah terdapat transparansi proses yang diberikan pegawai kelurahan terhadap setiap pemangku kepentingan dalam kampung madani?
 sebelum melakukan koordinasi dg warga setempat atau pihak ketiga (CSR), kami akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan kami, setelah melakukan tindak lanjut, kami akan menginformasi kembali kepada pihak terkait (di luar pemerintahan)
7. Apakah aturan yang dibuat konsisten dijalankan?
 konsisten namun intensitasnya masih belum terlampaui sering
8. Apakah proses komunikasi berjalan dengan baik antar pegawai kelurahan dalam menangani program kampung madani?
 baik, karena sesuai rencana dan terjadwal dengan baik
9. Apakah pegawai kelurahan memiliki pemahaman penuh terhadap program kampung madani ?
 tentu saja, setiap program memiliki SOP masing2 pada dinas pengampuh.
10. Apakah terdapat komitmen antara para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi?
 Ada
11. Apakah terdapat keberhasilan sementara yang dicapai dalam program kampung madani ?
 ada, penduduk miksini di kelurahan kami sedikit demi sedikit dapat berkurang, pemenuhan kebutuhan kesehatan dapat terpenuhi dg tepat, dll

Transkrip wawancara kelurahan jambangan, Sanny Noerma Safaaf, S.T, infroman sebagai lurah Jambangan. Wawancara dilakukan pada tanggal 30 April 2024 bertempat di Kantor Kelurahan Jambangan

1. Bagaimana pandangan pegawai kelurahan program kampung madani dengan dan pihak swasta?
 Pandangan Kampung madani definisinya secara etimologi adalah equal sama swadaya maupun berdaya dalam satu wilayah sehingga komunikasinya ya satu komunitas bukan berada di skup kecil hanya gamis. Tentunya kolaborasi itu secara defines lagi colaborasi itu adalah pengabungans satu atau dua kalau kita ngomong kelembagaan yang Lembaga Lembaga itu bergerak di bidang yang ditentukan dan memakai

hampir sumber dana yang berbeda sedangkan antara lazis dengan pemerintah kota itu sebenarnya dalam cakupan kenegaraan. Tentunya kalau antara lembaga pemerintah tapi saling mengisi mengsupport. Kalau dengan pihak swasta itu baru kolaborasi karena beda sumber dana pergerakan bidangnya, sejauh itu berdasarkan Analisa memungkinkan untuk terjadinya kolaborasi tentunya ada hal hal tertentu ada yang kita kolaborasikan. Kampung madani itu sumber dananya identik dengan zis apakah dari pihak ke 3 mau ngga anggarannya di dalam konteks ini sodaqahnya karyawan kita masukkan upz bisakah ini kira kira dana ini sifatnya akan menjadi injeksi contoh tidak sedikit ide pemerintah tidak cocok dengan swasta tentunya harus di match kan baik itu melalui regulasi atau melalui kebijakan kebijakan lain itu yang perlu dijadikan kajian, kalau misalkan kampung itu dalam skup besar akan menjadi kota madani surabaya tentunya hal itu harus direncanakan dengan matang. Kolaborasi mungkin kah tapi harus ada parameter parameter atau variable variable yang disitu bisa meyelamatkan kedua belah pihak itu yang harus dipertimbangkan. Ya mungkin.

2. Bagaimana jika terdapat ketidak seimbangan antara sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan yang berbeda?

Harus ada regulasi yang konsisten dan sebenarnya pembuatan regulasi itu tidak mudah kalau misalkan kita template masalah csr, regulasi csr apakah csr itu di tata dengan baik harus diciptakan yang menguntungkan kedua belah pihak dan bisa dipastikan obyek Sasaran itu tercapai apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak jangan sampai terjadi malconcern. Regulasinya harus benar secara terstruktur mulai dari atas hingga bawah karena tentunya tidak mungkin pemerintah kota surabaya membuat regulasi tersendiri tanpa mempertimbangkan regulasi baik itu perbub permen atau perpres. Ketika itu menjadi aturan sendiri Ketika itu crush tidak cocok itu regulasinya tertata dengan baik harus variabelnya dilakukan penelitian kemudian visi dan misi perusahaan atau csr itu harus match walaupun tidak sama sejajar

3. Bagaimana kemampuan kolaborasi pegawai kelurahan dalam pengelolaan tanggung jawab pada program kampung madani

Kapasitas kita hanya Pembina tidak dalam konteks masuk dalam sebuah struktur kampung madani tapi sebatas monitoring atau megawasi ataupun mengarah pada pembinaan batasannya hanya itu karena kampung madani dalam konteksnya adalah memberdayakan masyarakat secara umum bukan masyarakat miskin saja tapi masyarakat secara umum pemberdayaan seperti itu jadi kelurahan hanya memonitoring tidak lebih dari itu. Kenapa tidak dimasukkan dalam strktural karena petugas kelurahan terdapat rotasi kepegawaian

4. Apakah kolaborasi tersebut menghasilkan Keputusan yang sama antar pegawai kelurahan dengan masyarakat dan pihak swasta?
jika itu di tata dengan regulasi yang benar dengan berbagai macam pertimbangan dan berbagai macam analisa tentunya sangat dimungkinkan akan tetapi kita harus menyingkronkan visi dan misi
Pemerintah dengan Masyarakat dan kelurahan selalu berkordinasi dengan melakukan rapat evaluasi. Dan tentunya salah satu di dalam upz atau kampung madani itu adalah memang membentuk toko kelontong yang didalamnya dikelola oleh gamis
5. Bagaimana peran kepemimpinan dalam memfasilitasi kolaborasi dan memimpin berbagai pihak menuju pencapaian tujuan bersama?
dari pihak kampung madani Membutuhkan fasilitas kita akan mengkomunikasikan dengan pihak ketiganya dengan pihak csr nya atau kalau misalkan cukup dari dana zis situ tadi kita tidak perlu csr kita hanya perlu mendatangkan narasumber atau orang yang paham itu atau mungkin kita bisa mengkolaborasikan dengan pabrik?
6. Apakah terdapat transparansi proses yang diberikan pegawai kelurahan terhadap setiap pemangku kepentingan dalam kampung madani?
tentunya harus nya regulasinya tertata sampai dengan proses pembentukan ADART di kampung madani itu tiak sebatas sudah diberikan sk sama camat, lurah tapi harus ada kewajiban dari pengurus kampung madani itu untuk membuat ADART sehingga siapapun pengganti mereka tetep mengacu pada ADART. Harus ada komitmen dari perangkat itu sendiri dan seluruh stakeholder yang terlibat. Bersifat otonom harus berimpas dan efektif tidak berhenti pada satu kepemimpinan, harus menggerakkan masyarakat dalam arti menegakkan sukarela
7. Apakah aturan yang dibuat konsisten dijalankan?
Tetap pada Upaya sejauh pengamatan saya sampai kedepan dari 15 itu contoh ternyata ada lurah yang mengzakati kampung madani 1 juta per bulan jadi tidak ada pergerakan, pergerakan itu tentunya timbul dari kesadaran Masyarakat bukan top down tapi bottom up tentunya keinginan dari warga sinergi dengan pemerintah kota kalau orangnya malas atau mungkin setiap kegiatan dia provitor riting akan menjadi berbeda,
8. Apakah proses komunikasi berjalan dengan baik antar pegawai kelurahan dalam menangani program kampung madani?
Komunikasi dalam kelurahan jambangan berjalan dengan baik berkordinasi dengan laz atau upz yang berada di masjid
9. Apakah pegawai kelurahan memiliki pemahaman penuh terhadap program kampung madani ?

Pegawai kelurahan sifatnya sebagai pendamping tentunya pegawai kelurahan pahami program kampung madani karena terdapat penanggung jawab kampung madani itu sendiri.

10. Apakah terdapat komitmen antara para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi?

Ada

harus dilakukan pendampingan secara komitmen dan konsisten siapa yang berkomitmen dan konsisten pendamping dan user itu sendiri Upaya dan komitmen seluruh stakeholder Kita negara timur bukan negara barat tipikal masyarakat sangat mempengaruhi, peran dari pemerintah itu harus maksimal berikan semua pemahaman yang optimal dan itu peran dari pimpinan

11. Apakah terdapat keberhasilan sementara yang dicapai dalam program kampung madani?

Sudah terdapat 40 muzaki

Berhasil itu tercapainya masyarakat madani kebetulan yang ditunjuk dalam cakupan 1 rw dalamnya ada masjid dalam masjid yang mengelola zakat upz yang bernaung di dalam situ masjid kita rw 3 namanya masjid amair mukti ups amir mukti muzaki akan membayar zakat ke upz boleh ke takmir karena kemarin banyak keluhan warga harus dipisah uangnya karena takmir juga menerima infaq sadakah upz plus zakat kalau misalnya di pisah upz hanya spesialis zakat infaq sodakoh ada di masjid uang yang terkumpul ini barulah difungsikan, fungsinya bagaimana. 57 kk gamis 1 kk anggap 3 ada 30 an orang dari 60 kk dipilah mana yang lansia tidak produktif mana yang lansia produktif gamis produktif gamis disabilitas. Yang istilahnya uang zakat itu bersifat habis pakai itu dibagikan di gamis produktif kalau gamis lansia dikasih beras habis gamis lansia. 48.

Transkrip wawancara Bank Jatim dengan narasumber Satwika Dwi Utomo, S.Kom.Mm. wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2024 bertempat di Kantor utama bank jatim

1. Bagaimana bank jatim mendefinisikan program kampung madani?

Bank jatim sebagai penyedia aplikasi UPZ, siapa saja penerima zakat diinput dari rekening bank jatim kemudian disalurkan dengan kartu/NIK penerima. Kampung madani cukup bagus selama ini memang banyaknya zakat yang tidak disalurkan ke tangan yang tepat, kadang ada yang tidak berkah menerima. Dan untuk menghidupkan masjid di tersebut, dengan adanya program kampung madani para pengurus masjid dipaksa untuk aktif dan kemudian dipaksa untuk mengelola keuangan. Dan dari sisi bank jatim cukup bagus dikarenakan kewajiban untuk membuka rekening di bank jatim,

supaya bisa menyalurkan zakat, dana yang mengendap di bank jatim meningkat. Yang dipakai rekening bank jatim syariah tetapi yang memfasilitasi ke bank jatim utama karena bank jatim syariah masing berupa unit.

2. Bagaimana kolaborasi dengan pemerintah?
Inisiator dari pemerintah, sebelum ada program ini terdapat kolaborasi KIA, diapakai oleh anak untuk bisa digunakan di kantin, aplikasinya dari bank jatim.
3. Bagaimana Aturan dasar bank jatim?
Sop km madani ikut pemerintah, kalau di bank jatim sop VA, jadi setiap warga yang mendapatkan bantuan akan mendapat no VA berupa nik si penerima, upz akan memberikan penyaluran melalui VA
4. Bagaimana Pendampingan kepada masyarakat oleh bank jatim?
Pernah, jadi kita dilibatkan langsung oleh pemerintah teman teman cabang utama dan syaria sosialisasi kewarga untuk pembukaan rekening, kalau bank jatim cabang urama sosialisasi ke lurah
5. Bagaimana komitmen dari bank jatim?
Program km ini aplikasi nya sudah berjalan dan sudah diberikan kepada UPZ, tetapi untuk saat ini laporann terkahirnya memang masih belum ada penyaluran zakat/ bantuan lagi, tetapi secara program dan bantuan bank jatim tetap support.
6. Bagaimana Hasil sementara yang di dapatkan?
Hasilnya banyak takmir masjid yang membuka rekening ke kami jadi meningkat, tugas nya bank adalan menerima kemudian menyalurkannya kepada masyarakat.
7. Bagaimana Membangun kepercayaan dengan masyarakat dan stakeholder?
Ikut terlibat seperti pada saat sosialisasi bank jatim memnerikan pemahaman kepada msayarakat bahwa danayang dikelola oleh bank sebagai Lembaga yang terpercaya, jadi masyarakat penerima bantuan dan takmir masjid mereka jadi yakin, kalau dari bank kan penyalurannya lewat rekening jadi tidakhawatir untuk membawa uang cash yang banyak
8. Bagaimana Struktur organisasi bank jatim?
Secara khusus tidak ada masi secara general telati jobdesk nya sudah dibagi bank jatim cabang utama bertugas untuk membuka rekening bagi upz atau takmir masjid untuk penyaluran, cank jatim sayriah menangani kebutuhan para takmir masjid jika butuh cek giro atau menabung, kantor pusat sebagai pembuat aplikasi, kalau untuk struktur organisasi khusus masi belum ada
9. Bagaimana kesepakatan pemerintah dengan bank jatim ?
Mou bukan sudah ada lebih ke pks karena sudah ada kerjasmaa sebelumnya jadi pelayanan pemkot surabaya

10. Bagaimana Pemahaman bank jatim mengenai program kampung madani?
Paham karena dilibatkan dari awal, untuk rapat evaluasi bank jatim cabang utama, setau kami rutin tapi tidak tentu, awal awal malah setiap minggu, kalau sekarang mulai jarang.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

1. Dokumentasi wawancara dengan Dinas Sosial

Wawancara dilakukan dengan ibu Anisya, S.H selaku sebagai tim koordinasi Perlindungan Sisial, Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial



2. Dokumentasi wawancara dengan kelurahan Jambangan

Wawancara dilakuakn dengan Bapak Sanny Noerma, S.T selaku Lurah Jambangan



- 3. Dokumentasi wawancara dengan kelurahan Pradah Kalikendal**
Wawancara dilakukan dengan ibu Shanti Hartanto, S.Sosio selaku KASIKESRA Kelurahan Pradah Kalikendal



- 4. Dokumentasi wawancara dengan BAZNAS**
wawancara dilakukan dengan Bapak Imam Syafi'i S.T selaku Kepala Pelaksana IT dan Umum



5. Dokumentasi wawancara dengan Bank Jatim

Wawancara dilakukan dengan bapak Satwika Dwi Utomo, S.Kom.Mm.



Lampiran 4 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Difa Adristi Efelian Feblianto

NIM : 1112000214

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : Collaborative Governance Tentang Kampung Madani
Sebagai Upaya pemberdayaan Masyarakat Miskin di
Kota Surabaya.

Catatan Perbaikan:

- Revisi Sesuai Pedoman Penulisan
Skripsi

- tambah daftar lampiran

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Yusuf Hariyoko


Yusuf Hariyoko

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 5 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Diffa Adristi Efelian Feblianto

NIM : 1112000214

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi :

Collaborative Governance Tentang Kampung Madani
Sebagai Upaya pemberdayaan masyarakat miskin
di kota Surabaya.

Catatan Perbaikan:

- ✓ ① Gunakan penulisan SPOL, huruf besar kecil, cek cara penulisan kutipan dan sumber
- ✓ ② Judul di buat anak kalimat → perbandingan
- ✓ ③ Rumusan masalah belum ada tanda tanya
- ④ Belum muncul grand theory + teori
- ⑤ Apakah belum ada narasumber dari masyarakat
- ⑥ Teknik analisis data cek lagi → tahap pengumpulan data
- ⑦ Saran dibuat list → Aktor + kota besar + heterogen.
- ① CSR, OPD... harus melaksanakan koordinasi, normakan program & pembagian tugas dan lagi.
- ② .

Surabaya, 1 Juli 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Anggraeny Puspaningtyas, M AP


Anggraeny Puspaningtyas, M AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 6 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Diffa Adristi Efelian Feblianto

NIM : 1112000214

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : Collaborative Governance Tentang Kampung Madani sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Surabaya.

Catatan Perbaikan:

Lihat & skripsi
Waktu konsultasi revisi wajib membawa skripsi
sebelum & setelah & revisi.

Surabaya, 1 Juli 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 7 Surat Perizinan Observasi Instansi Perguruan Tinggi

1. Surat perizinan Dinas Sosial



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 20 Mei 2024

Nomor : 1544/K/FISIP/V/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Diffa Adristi Efelian Feblianto (1112000214)	Jl. Dukuh Pakis Baru 2C/15, Surabaya	081235652531

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dinas Sosial Kota Surabaya"

Dengan Judul Skripsi: **"Collaborative Governance Tentang Kampung Madani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.
NPP 20120.87.0103

2. Surat penelitian kelurahan Pradah Kalikendal dan Kelurahan Jambangan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 23 April 2024

Nomor : 1160/K/FISIP/IV/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
 Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Diffa Adristi Efelian Feblianto (1112000214)	Jl. Dukuh Pakis Baru 2C/15, Surabaya	081235652531

Guna melakukan pengambilan data di:

"Kelurahan Pradah KaliKendal dan Kelurahan Jambangan"

Dengan Judul Skripsi: **"Collaborative Governance Tentang Kampung Madani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Dekan
Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P
 NPP 20120.87.0103

3. Surat penelitian BAZNAS


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 30 April 2024

Nomor : 1255/K/FISIP/IV/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
 Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini;

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Diffa Adristi Efelian Feblianto (1112000214)	Jl. Dukuh Pakis Baru 2C/15, Surabaya	081235652531

Guna melakukan pengambilan data di:

"Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya"

Dengan Judul Skripsi: **"Collaborative Governance Tentang Kampung Madani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Surabaya"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Dr. Dya. Ayun Maduwinarti, M.P
 NPM 20120.87.0103

4. Surat Penelitian Bank Jatim


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 3 Juni 2024

Nomor : 1764/K/FISIP/VI/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Corporate Secretary Bank Jatim Kantor Pusat
 Jl. Basuki Rahmat No.98-104, Embong Kaliasin,
 Kec. Genteng, Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Diffa Adristi Efelian Feblianto (1112000214)	Jl. Dukuh Pakis Baru 2C/15, Surabaya	081235652531

Guna melakukan pengambilan data di:

"Bank Jatim Kantor Pusat"

Dengan Judul Skripsi: **"Collaborative Governance Tentang Kampung Madani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


 Dr. Dra. Bayun Maduwinarti, M.P.
 NPP 2020.87.0103

5. Surat Perizinan Penelitian SSW Alva Dinas Sosial



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
 Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 21 Mei 2024

Kepada

Yth. (terlampir)

Nomor : 500.16.7.4 / 2132 / S / RPM /
 436.7.15 / 2024

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Surat Keterangan Penelitian

di -
Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :**
1. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/208.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Penerbitan Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol Prov Jatim
 2. Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penelitian dan Non Penelitian di Kota Surabaya
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal
- Memperhatikan :**
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : DIFFA ADRISTI EFELIAN F
 - b. Alamat : DUKUH PAKIS BARU 2 C/15
 - c. Pekerjaan/Jabatan : PELAJAR/MAHASISWA
 - d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 - e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : COLLABORATIVE GOVERNANCE TENTANG KAMPUNG MADANI SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SURABAYA
 - b. Tujuan : Penelitian
 - c. Bidang Penelitian : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - d. Penanggung Jawab : DIFFA ADRISTI EFELIAN FEBLIANTO
 - e. Anggota Peserta :
 - f. Waktu : 21 Mei 2024 s.d. 30 Juni 2024
 - g. Lokasi : (terlampir)
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
 2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
 4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
 5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketuhanan NKRI;
 7. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga;
 8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
 7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a.n WALIKOTA SURABAYA
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu



(Signature)

M. Alghani Wardana S SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196405051960031200

6. Surat perizinan peneliti SSW Alva Kelurahan Jambangan dan Kelurahan Pradah Kalikendal



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (LL.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 25 April 2024

Kepada

Yth. (terlampir)

Nomor : 500.16.7.4 / 1698 / S / RPM /

436.7.15 / 2024

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Surat Keterangan Penelitian

di -

Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar

1. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Peraturan Surat Izin Penelitian Bakesbangpol Prov Jatim
2. Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Peraturan dan Non-Peraturan di Kota Surabaya
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
4. Peraturan Teknik Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal

Memperhatikan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : DIFFA ADRISTI EFELIAN F
- b. Alamat : DUKUH PAKIS BARU 2 C/15
- c. Pekerjaan/Jabatan : PELAJAR/MAHASISWA
- d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
- e. Kewarganegaraan : INDONESIA

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul / Tema : COLLABORATIVE GOVERNANCE TENTANG KAMPUNG MADANI SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SURABAYA

- b. Tujuan : Penelitian
- c. Bidang Penelitian : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- d. Penanggung Jawab : DIFFA ADRISTI EFELIAN FEBLIANTO

e. Anggota Peserta

f. Waktu

g. Lokasi

Dengan persyaratan

1. 24 April 2024 s.d. 31 Mei 2024 (terlampir)
1. Dalam masa pandemi Covid 19, Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020.
2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah.
4. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian.
5. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib menaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder.
6. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketertuhan NKRI.
7. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga.
8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardana S SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640401980000000